



Article Informations

*Received:* 28/08/2025; *Accepted:*  
27/02/2025; *Published:* 27/02/2025

Corresponding Email:

fauzanfaturahman208@gmail.com

## KEPENTINGAN NASIONAL KOREA SELATAN DALAM MENYEPAKATI DEKLARASI PANMUNJOM PADA TAHUN 2018

**Muhammad Fauzan Faturahman**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Pada 2018 Korea Selatan dan Korea Utara Sepakat untuk menandatangani Deklarasi Panmunjom yang dilakukan di zona demiliterisasi Panmunjom. Deklarasi ini merupakan sejarah bagi kedua negara karena untuk pertama kalinya kedua negara menandatangani perjanjian perdamaian karena selama 65 tahun perjanjian yang digunakan untuk mengakhiri perang hanyalah perjanjian gencatan senjata. Selain itu beberapa kesepakatan penting juga seperti denuklirisasi, penghentian permusuhan, serta kerjasama antara kedua Korea. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan nasional Korea Selatan dalam menyepakati deklarasi Panmunjom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil data yang didapat dari studi kepustakaan kembali di analisis, melalui pendekatan realisme dan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian ini adalah kepentingan nasional Korea Selatan adalah menjaga negaranya dari ancaman nuklir mempertahankan ekonominya tetap stabil, menciptakan kawasan semenanjung Korea yang damai serta membangun identitas bersama.

**Kata Kunci:** Deklarasi Panmunjom, Kepentingan Nasional, Korea Selatan

### **Abstract**

*In 2018 South Korea and North Korea agreed to sign the Panmunjom Declaration which was carried out in the Panmunjom demilitarized zone. This declaration is history for both countries because it is the first time that both countries have signed a peace agreement because for 65 years the only agreement used to end the war was a ceasefire agreement. Apart from that, there are also several important agreements*

*such as denuclearization, cessation of hostilities, and cooperation between the two Koreas. The general objective of this study is to determine the national interests of South Korea in agreeing to the Panmunjom declaration. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis research type. The data collection technique in this study is by conducting a literature study. The results of the data obtained from the literature study were re-analyzed, through a realism approach and the concept of national interest. The results of this study are that South Korea's national interests are to protect its country from nuclear threats, maintain its stable economy, create a peaceful Korean peninsula region and build a shared identity.*

**Keywords:** Panmunjom Declaration, National Interests, South Korea

## **PENDAHULUAN**

Hubungan internasional merupakan struktur yang anarki, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional berinteraksi di dalam struktur internasional yang anarki mendorong munculnya rasa saling curiga, ketakutan, dan perasaan tidak aman dari masing-masing aktor.<sup>1</sup> Seperti halnya Korea Selatan semenjak gencatan senjata pada tahun 1953 dengan Korea Utara selalu merasa curiga dan was was terhadap negara tetangganya tersebut akibat dari aktivitas pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Sebelum itu semenanjung Korea awalnya merupakan satu negara yaitu Kerajaan Joseon namun pada tahun 1907 Kerajaan Joseon berhasil diambil alih oleh Jepang, awal mula kedua negara terbagi menjadi 2 wilayah terjadi saat kekalahan Jepang pada perang dunia ke-II yang telah menduduki semenanjung Korea selama 35 tahun lamanya. Setelah itu semenanjung Korea berpindah tangan ke Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kemudian membagi wilayahnya menjadi 2 wilayah administratif dimana Amerika Serikat di selatan dan Uni Soviet di utara dengan alasan untuk mengawasi penarikan pasukan Jepang, disinilah awal mula terbaginya 2 negara dimulai dari ketidak sepahaman antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada saat itu kedua negara super power ini berusaha untuk menyebarkan ideologinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik) Edisi Revisi (Surabaya: Air Langga University Press:2018),Hal.

<sup>2</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, Serafica Gischa, Kenapa Korea Terbagi Menjadi Utara dan Selatan?, Kompas.com, internet, (Maret2021), <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/38/1/24509669/kenapa-korea-terbagi-menjadi-utara-dan-selatan?page=all> diakses pada 20 mei 2023

Amerika Serikat menduduki wilayah selatan dan mengangkat Syngman Rhee sebagai pemimpin dengan ideologi kapitalisnya, sedangkan Uni Soviet mengumumkan Republik Demokratik Rakyat Korea, dipimpin oleh Kim Il Sung seorang anggota partai pekerja Korea dan mantan pejuang gerilya untuk memimpin wilayah utara dengan ideologi komunis. Sejak saat itu semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara dan tidak mengakui legitimasi pemerintahan dari masing-masing wilayah.<sup>3</sup> Akibat dari perbedaan ideologi perang pun pecah pada tanggal 25 Juni 1950 dimana Korea Utara menyerang Korea Selatan dan terjadilah Perang Korea. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pun mengambil tindakan dan mengirimkan pasukan, yang kemudian pada tanggal 27 Juli 1953 pertempuran diakhiri dengan gencatan senjata sehingga menimbulkan zona demiliterisasi dan penjagaan ketat disepanjang paralel 38 oleh pasukan militer kedua negara, gencatan senjata ini hanyalah merupakan upaya dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah militer namun untuk hubungan politiknya tidak dapat dikatakan membaik, karena setelah terjadinya gencatan senjata tersebut hubungan kedua negara kerap kali mengalami pasang surut dan menunjukkan ketidak harmonisannya.<sup>4</sup>

Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang penting dalam hubungan internasional, hal ini merupakan salah satu faktor mengapa kawasan ini sangat rawan terhadap konflik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini merupakan sebuah faktor yang menjadikan semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu dalam konflik ini ditunggangi juga oleh beberapa kepentingan negara lain yang memiliki kekuatan besar seperti halnya Amerika dan China. Konflik yang terjadi di semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga tahun 2017 masih belum memiliki kesepakatan damai resmi yang tertulis, keduanya masih berstatus gencatan senjata sejak tahun 1953.<sup>5</sup> Namun meskipun konflik kedua negara terjadi berlarut larut tidak menyurutkan niat kedua

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Bruce Cummings, *The Origins of the Korea War Volume II*. (Chicago: Cornell University Press, 2004) 24

negara untuk mencapai reunifikasi, tiap Presiden Korea Selatan memiliki cara dalam menyikapi kebijakannya tersendiri dalam menyikapi perdamaian dan reunifikasi dengan Korea Utara, Kim Dae jung yang terkenal dengan kebijakan *sunshine policy* nya dan Park Geun Hye dengan *Trust Policy*.

Neorealisme berpendapat bahwa dalam tatanan dunia internasional sistem lah yang mempengaruhi tindakan dari suatu aktor dalam hal ini adalah negara, berubahnya sistem internasional berarti memaksa suatu negara untuk merubah kebijakannya.<sup>6</sup>

Pada 2017 Moon Jae In terpilih sebagai Presiden Korea Selatan tidak seperti dua pemimpin sebelumnya yakni Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang meninggalkan kebijakan *Sunshine Policy* justru, Moon Jae In mengatakan bahwa ia akan menggunakan pendekatan dengan Korea Utara melalui perbaikan hubungan kedua negara. Moon Jae in juga berencana memberlakukan kembali kerjasama antar Korea dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam cakupan sanksi internasional yang diberlakukan kepada Korea Utara. Pendekatan Moon Jae In terinspirasi dari kebijakan *Ostpolitik* yang pernah diberlakukan untuk *unifikasi* Jerman Timur dan Jerman Barat yakni dengan cara berhubungan secara langsung, atau juga dapat disebut sebagai usaha-usaha Moon Jae In dalam rangka menormalkan kembali hubungan kedua Negara Korea.<sup>7</sup> Namun sebelum terpilihnya Moon Jae In Korea Utara sedang gencar-gencarnya melakukan uji coba senjata nuklir .Korea Utara meluncurkan serangkaian uji coba nuklir, puncaknya ketika rudal Hwasong 12 melintas diatas wilayah udara Jepang.<sup>8</sup> Uji coba tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai negara, bahkan pada uji coba ke enam badan survei geologi Amerika Serikat melaporkan gempa bumi berkekuatan 6,3 tidak jauh dari tempat uji coba

---

<sup>6</sup> Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik) Edisi Revisi (Surabaya: Air Langga University Press: 2018), Hal

<sup>7</sup> Yoon Young Kwang, Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon, project syndicate ( 6 Juni 2017) Internet, <https://www.project-syndicate.org/commentary/moon-jae-in-foreign-policy-north-korea-by-yoon-young-kwan-2017-05/indonesian> diakses pada 20 Juni 2023

<sup>8</sup> BBC.com, Korea Utara meluncurkan rudal melintasi angkasa Jepang, Indonesia mengecam,(29 Agustus 2017),Internet, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41077034>, diakses pada 20 Juni 2023

nuklir, yang menunjukkan adanya uji coba nuklir.<sup>9</sup> Akan tetapi Moon Jae In tetap ingin membangun hubungan baik dengan Korea Utara padahal uji coba tersebut sangat membahayakan kedaulatan Korea Selatan.

Neorealisme berpendapat bahwa dalam tatanan dunia internasional sistem lah yang mempengaruhi tindakan dari suatu aktor dalam hal ini adalah negara, berubahnya sistem internasional berarti memaksa suatu negara untuk merubah kebijakannya.

Moon Jae In mengumumkan deklarasi Berlin dalam pidatonya menyatakan keinginannya untuk menciptakan perdamaian di semenanjung Korea dan berkomitmen untuk melakukan dialog dengan kedua Korea Utara.<sup>10</sup> Hingga pada akhirnya pada tanggal 27 April 2018 konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Kedua Korea dilaksanakan di *Peace of House*, kedua negara sepakat untuk menandatangani deklarasi Panmunjom atau disebut sebagai *Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula* yang ditandatangani langsung oleh pemimpin kedua negara yaitu Moon Jae In dari pihak Korea Selatan dan Kim Jong Un, kedua negara juga sepakat untuk mengubah perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian perdamaian.<sup>11</sup> Perjanjian ini merupakan pertama kalinya bagi kedua Korea dalam menyepakati perjanjian perdamaian karena sebelumnya hanya berupa gencatan senjata saja. Padahal sebelumnya Korea Selatan sempat mengecam tindakan Korea Utara terkait dengan uji coba senjata nuklir yang gencar

---

<sup>9</sup> Kompas.com, Hari Ini dalam Sejarah: Uji Coba Nuklir Terdahsyat Korea Utara,(3 Juni 2021), <https://internasional.kompas.com/read/2021/09/03/162824370/hari-ini-dalam-sejarah-uji-coba-nuklir-terdahsyat-korea-utara?page=all> diakses pada 20 Juni 2023

<sup>10</sup> Deklarasi Berlin dan Kegiatan Diplomasi Presiden Moon Jae-in, KBS World Indonesia (9 Juli 2017), Internet,[http://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=issues&id=&board\\_seq=58227&page=72&board\\_code=news\\_hotissue](http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=issues&id=&board_seq=58227&page=72&board_code=news_hotissue) diakses pada 20 Juni 2023

<sup>11</sup> Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of The Korean Peninsula, *Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea*,( 9 September 2018),Internet,[https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m\\_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi\\_itm\\_seq=0&itm\\_seq\\_1=0&itm\\_seq\\_2=0&company\\_cd=&company\\_nm=&page=1&titleNm=](https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5478/view.do?seq=319130&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm=) diakses pada 23 Juni 2023

dilakukan oleh Korea Utara pada 2017. Nama Panmunjom sendiri diambil dari nama tempat dimana pertemuan itu berlangsung.

Deklarasi ini berisi tentang perjanjian dan komitmen Korea Selatan dan Korea Utara dalam mengakhiri perang yang permanen serta menciptakan perdamaian di semenanjung Korea. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam upaya mewujudkan denuklirisasi di semenanjung Korea dan mencapai beberapa kesepakatan lain, seperti menyatukan kembali keluarga korban perang yang terpisah di Korea Utara dan Selatan, serta pengeriman atlet ke kompetisi internasional dalam satu bendera yaitu *unifikasi Korea* di Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 lalu yang diselenggarakan di Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan Korea Selatan dan Korea Utara untuk melakukan perdamaian dibawah kesepakatan deklarasi Panmunjom.<sup>12</sup>

Deklarasi Panmunjom merupakan salah satu langkah penting diantara Korea Selatan dan Korea Utara yang dikaitkan dengan isu reunifikasi. Namun deklarasi Panmunjom bukanlah kali pertama upaya kedua negara tersebut dalam melakukan usaha perdamaian, tercatat bahwa upaya reunifikasi ini pernah juga diusulkan pada tahun 2010 dan 2011 oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, namun hal ini direspon negatif oleh Korea Utara yang menyatakan bahwa inisiasi Korea Selatan terkait dengan reunifikasi ini hanya akan memperburuk hubungan antara kedua negara. Karena terjadinya *reunifikasi* disebabkan oleh salah satu negara runtuh, dan negara lain harus menanggung beban negara lainnya.

Namun Jika kita melihat pertemuan bilateral dari kedua negara sebelumnya yaitu pada tahun 2000 dan 2007 banyak yang meragukan bahwa deklarasi panmunjom dapat mempengaruhi perubahan yang berarti di kawasan semenanjung Korea termasuk dalam keamanan regional di kawasan tersebut , dukungan negara adidaya yang menjadi sekutu mereka selalu menjadi batu penghalang untuk kedua negara berdamai. Selain itu ketidak konsistenan

---

<sup>12</sup> Tempo.co. North and South Korea United in 2018 Asian Games ( 3 maret 2018) <http://en.tempoco/read/919573/north-and-south-korea-tounite-in2018-asia-games> diakses pada 20 Juni 2023

Korea Utara, yang kerap kali melakukan uji coba senjata nuklir merupakan salah satu pemicu hubungan kedua negara ini sewaktu-waktu bisa memanas bahkan sejak tahun 1948 sampai 2017 Korea Utara telah melakukan 114 kali uji coba nuklir.<sup>13</sup>

Korea Utara sendiri telah diberikan sanksi oleh dewan keamanan PBB Pada agustus 2017 melalui Resolusi 2371, dewan keamanan PBB telah mengeluarkan sanksi yang dianggap sebagai yang paling berat yang pernah dikenakan kepada Korea Utara. Keputusan ini diambil setelah 15 anggota dewan keamanan PBB memberikan suara bulat untuk memberlakukan sanksi sebagai tanggapan terhadap uji coba 42 rudal balistik antar benua yang dilakukan Korea Utara pada juli 2017. Sanksi tersebut meliputi larangan ekspor batu bara, besi dan bijih besi dari Korea Utara. Resolusi terbaru, yaitu resolusi 2375, disetujui dan diadopsi pada tanggal 11 september 2017. Resolusi ini mencakup larangan pasokan, penjualan, atau transfer semua kondensat dan cairan gas alam ke Korea Utara, dengan pengecualian sebanyak 500.000 barel selama tiga bulan.<sup>14</sup> Selain itu, resolusi ini juga melarang ekspor tekstil Korea Utara dan visa kerja baru untuk pekerja Korea Utara di luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar Kim Jong Un selaku Pemimpin Korea Utara mengurungkan niatnya untuk mengembangkan senjata nuklir. PBB juga membatasi transaksi keuangan oleh bank-bank Korea Utara dan melarang semua penerbangan yang diindikasikan membawa barang-barang selundupan ke Pyongyang.

Setelah dijatuhkannya sanksi berat oleh dewan keamanan PBB, Kim Jong Un selaku pemimpin Korea Utara sama sekali tidak berniat mengurungkan niatnya untuk terus mengembangkan program nuklir Korea Utara, bahkan setelah dijatuhkan sanksi oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Kim Jong Un malah memberikan respon terhadap sanksi tersebut dengan menembakkan enam rudal balistik ke arah semenanjung Korea dan

---

<sup>13</sup> Bbc.com, Bagaimana Korea Utara mendanai senjata nuklir? Tujuh hal yang harus Anda ketahui,(6 September 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41158713> , diakses pada 20 Juni 2023

<sup>14</sup> Armscontrol.org, UN Security Council Resolutions on North Korea,<https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea#res2371>, Diakses pada 20 Juni 2023

memberikan statemen bahwa sanksi-sanksi yang diberikan oleh PBB terhadap negaranya merupakan sebuah pelanggaran keras terhadap negara yang berdaulat.

Oleh karena itu deklarasi Panmunjom ini perlu dikaji lebih dalam terutama dari perspektif Korea Selatan terhadap inisiasi deklarasi Panmunjom, serta mencari tahu lebih dalam mengenai motivasi ataupun kepentingan Korea Selatan atas disepakatinya deklarasi Panmunjom. Selain itu deklarasi untuk merupakan komitmen dari kedua negara untuk mengakhiri perang dan penting untuk menilai prospek perdamaian dan *unifikasi* di Semenanjung Korea. Meskipun deklarasi ini merupakan langkah signifikan menuju perdamaian, penting untuk mempertimbangkan peran negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan China, dalam mencapai perdamaian abadi dan stabilitas di kawasan. Bahwa tidak dapat dipungkiri kedua negara tersebut masih dipengaruhi oleh sekutunya yang merupakan negara super power yaitu Amerika dan China.

Terpecahnya semenanjung Korea telah menjadi sumber ketegangan dan konflik selama beberapa dekade, dan penting untuk mengkaji implikasi keamanan dari deklarasi tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keamanan regional dan internasional. Secara ekonomi deklarasi Panmunjom ini lebih banyak menyokong kesejahteraan Korea Utara yang sebelumnya telah mendapatkan teguran internasional atas usaha uji coba bom nuklir. Maka jika dilihat lebih seksama Korea Selatan memanfaatkan kondisi, dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap Korea Utara untuk membuka dialog dengan membuka dialog guna menyikapi kesepakatan dalam deklarasi Panmunjom.

Beberapa kesepakatan perdamaian sebelumnya tidak pernah berakhir sempurna dan benar-benar memberikan perdamaian yang absolut di antara kedua negara tersebut. Deklarasi ini mencakup komitmen terhadap denuklirisasi, dan penting untuk mengkaji bagaimana hal ini dapat dicapai dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan upaya ini.



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis melihat meskipun konflik terjadi berlarut-larut dan upaya dilakukan selalu gagal akan tetapi tidak melunturkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Moon Jae In maupun oleh presiden sebelumnya. Melalui deklarasi Panmunjom, untuk pertama kalinya kedua Korea sepakat menandatangani perjanjian damai yang telah lama diharapkan oleh banyak pihak lalu untuk pertama kalinya Korea Utara menyetujui point tentang denuklirisasi, disini penulis tertarik meneliti apa Kepentingan Nasional Korea Selatan dalam menyetujui deklarasi Panmunjom karena kita tahu sendiri upaya dari presiden-presiden sebelumnya selalu menemui kegagalan dan hubungan kedua negara menjadi memburuk dikarenakan Korea Utara membatalkan perjanjian dan juga pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang tentu saja mengancam kedaulatan Korea Selatan, disamping itu terdapat dugaan bahwa melunaknya sikap Korea Utara disebabkan oleh tekanan ekonomi yang menimpa Korea Utara merupakan salah satu sebab mengapa Korea Utara mau menyatakan pernyataan damai dengan Korea Selatan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Hubungan Korea Selatan-Korea Utara Sebelum era Moon Jae In**

Sejak berakhirnya Perang Korea Pada 1953 hubungan Korea Selatan dan Korea Utara selalu mengalami pasang surut hal ini dikarenakan perjanjian yang menghentikan peperangan hanyalah sebatas gencatan senjata. Ketegangan militer diantara kedua negara tidak pernah berhenti. Dalam masa gencatan senjata pun, Korea Utara kerap melakukan serangan terhadap Korea Selatan. Beberapa diantaranya adalah percobaan pembunuhan Presiden Park Chung Hee pada tahun 1968, percobaan pembunuhan Presiden Chun Doo Hwan pada 1983 dan spionase di salah satu pelabuhan Korea Selatan pada 1996.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Veronika Yasinta, "Inilah Momen Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan Selama 68 Tahun," Kompas,Internet ( 9 Januari 2018) , <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/12084661/inilah-momen-ketegangankorea-utara-dan-korea-selatan-selama-68-tahun diakses pada 28> Februari 2024

Kebijakan *reunifikasi* Korea dari Kim Dae Jung, presiden Korea Selatan dari tahun 1998 hingga 2003, disebut *sunshine policy*. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan Korea Selatan dan Korea Utara dengan menerapkan upaya diplomasi, ekonomi dan kemanusiaan. Kim Dae Jung berusaha mengurangi ketegangan dan memelopori upaya rekonsiliasi antara dua negara yang tetap bermusuhan dengan Perang Korea.<sup>16</sup>

Tujuan dari dibentuknya *sunshine policy* ini yaitu untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan serta konfrontasi antar kedua negara. Dan juga untuk meredam atau bahkan menghilangkan ketegangan diantara kedua negara yang telah terjadi semenjak adanya perang, agar selanjutnya tercipta keadaan yang damai di kawasan Semenanjung Korea. *Sunshine policy* sendiri dibentuk berdasarkan konsep kerjasama, perdamaian, dan rekonsiliasi. Sedangkan prinsip dasar dari *sunshine policy* yaitu meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Karena menurut Korea Selatan untuk mendekati Korea Utara lebih mudah melalui bidang ekonomi dibandingkan dengan bidang politik dan keamanan. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Utara sangat membutuhkan adanya bantuan di bidang ekonomi dan pangan. Dan prinsip dasar lainnya yaitu *reciprocity*. Kim Dae Jung mengartikan hal tersebut sebagai hubungan timbal balik diantara Korea Selatan dan Korea Utara. Diharapkan dengan adanya *sunshine policy*, kedua negara akan sama-sama diuntungkan.<sup>17</sup>

Kebijakan *reunifikasi* dengan menggunakan dialog secara damai berkat hal ini kesepatakan *reunifikasi* melalui jalur damai pun disepakati oleh pemimpin masing-masing Korea Hingga Akhirnya berhasil melaksanakan konferensi tingkat tinggi (KTT) antar Korea pada tahun 2000, Presiden Kim Dae Jong dan Kim Jong Il dalam *inter-Korean summit* yang dilaksanakan pada 15 juni 2000 yang dilaksanakan di Pyongyang pertemuan itu kemudian menghasilkan *joint declaration* yang disepakati oleh Korea Selatan dan Korea

---

<sup>16</sup> Govindasamy, Geetha. "Kim Dae Jung and The Sunshine Policy: An Appealing Policy Option for Inter-Korean Relations". Sarjana. Vol. 27. No. 1, June 2012

<sup>17</sup> Ibid

Utara.<sup>18</sup> Dan sejak saat itulah, konsep baru *reunifikasi* Korea mulai dikuatkan, yakni bukanlah penyatuan secara pemerintahan tetapi hidup bersama dengan damai dan sejahtera dengan mengakui pemerintahan masing-masing bukan dengan penyatuan pemerintahan Korea Selatan dan Korea Utara.<sup>19</sup> Kebijakan *sunshine policy* merupakan konsep konsiliasi, perdamaian, dan kerjasama antara Korea Selatan dan Korea utara tujuan adalah untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan konfrontasi antara kedua negara dengan rekonsiliasi, serta menghilangkan ketegangan di Semenanjung Korea agar terciptanya perdamaian.<sup>20</sup> Sunshine Policy memiliki tiga prinsip utama, yaitu yang pertama jika ada provokasi militer dari pihak Korea utara maka pihak Korea Selatan tidak akan mentolelir, yang kedua Korea Selatan tidak akan berusaha untuk menyerang Korea Utara dengan cara apapun, dan yang ketiga Korea Selatan akan berkomitmen melakukan kerja sama dan rekonsiliasi yang menguntungkan dua belah pihak.

Namun, *sunshine policy* tidak hanya memberikan hasil yang positif saja. Pada tahun 2002, Korea Utara mulai mengembangkan uji nuklirnya kembali. Hal ini tentu membuat Korea Selatan terancam akan stabilitas keamanannya. Tetapi, pihak Korea Utara mengatakan hal itu merupakan bentuk pertahanan negaranya. Dengan adanya hal ini, maka *sunshine policy* sudah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Pada tanggal 29 juni 2002, terjadi pertempuran antara Korea Selatan dan Korea Utara di wilayah laut perbatasan. Hal itu mengakibatkan tewasnya empat pelaut asal Korea Selatan. Dan korban dari Korea Utara tidak diketahui berapa jumlahnya, serta kapal milik Korea Utara yang dikabarkan tenggelam. Korea Selatan mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kapal milik Korea Utara melewati batas wilayah. Pihak Korea Selatan sudah memberikan peringatan terhadap Korea Utara, namun pihak Korea Utara justru melawan dengan menembaki kapal patroli Korea Selatan. Sedangkan menurut Korea Utara,

---

<sup>18</sup> Yoon, Yang Seung dan Mohtar Mas'ood, *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004). 44

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Vidyana Putri, "Pengaruh Karakteristik Pemimpin Korea Selatan terhadap Implementasi Sunshine Policy Tahun 1998-2010"

Korea Selatanlah yang memulai pertempuran tersebut dengan menembaki kapal milik Korea Utara dan mereka hanya melakukan pembelaan diri. Peristiwa tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan antar kedua negara.<sup>21</sup>

Pada tahun 2003, Roh Moon-hyun terpilih menjadi Presiden Korea Selatan menggantikan Kim Dae Jung. Roh merupakan tokoh liberal, pada masa kampanye Roh secara konsisten mengatakan bahwa untuk kemakmuran dan eksistensi bangsa, maka *sunshine policy* masih diperlukan sehingga kebijakan tersebut harus dilanjutkan. Roh Moonhyun dikenal sebagai tokoh yang anti terhadap Amerika Serikat. Hal itu diperlihatkan Roh dengan sering mengkritik pemerintahan Amerika. Sikap anti terhadap Amerika Serikat tersebut dimanfaatkan Roh untuk menarik perhatian masyarakat khususnya bagi pemilih muda yang menginginkan adanya hubungan yang lebih setara dengan Amerika Serikat. Roh juga mengatakan bahwa dia akan lebih bersikap netral jika perang terjadi antara Amerika dan Korea Utara.<sup>22</sup>

*Sunshine Policy* akhirnya diakhiri pada 2010 oleh presiden terpilih saat itu yaitu Lee Myung Bak karena dinilai gagal dan lebih menguntungkan pihak Korea Utara yang kemudian kebijakan tersebut dihapus dan digantikan dengan kebijakan baru yaitu, *hardline policy*. Ketika peluncuran artileri Korea Utara menewaskan dua warga sipil dan dua anggota militer Korea Selatan pada november 2010. Tindakan yang dilakukan beliau adalah dengan memberhentikan hubungan perdangan dan lebih memperkuat kekuatan militer dan bekerjasama dengan Amerika Serikat.<sup>23</sup> Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2009 serta serangan yang dilakukan kepada kapal Cheonan milik Korea Selatan pada tahun 2010 dan menewaskan kurang lebih 46 orang merupakan dampak yang di timbulkan

---

<sup>21</sup> Rasheed Gunawan, "29-6-2002: Pertempuran 'Berdarah' Korsel-Korut di Laut Perbatasan", *Liputan6* (29 Juni 2015), Internet <https://www.liputan6.com/global/read/2261017/29-6-2002-pertempuran-berdarah-korsel-korut-di-laut-perbatasan> diakses 3 Maret 2024

<sup>22</sup> Kim, Kim, Hong Neck. "South-North Korean Relations Under The Roh Moo Hyun Government. *International Journal of Korean Studies*"., Vol. X, No.1, 2006

<sup>23</sup> Radio Australia, "Sejarah di balik ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: kilas balik," Radio Australia, ,Internet ( 5 Maret 2013) <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-koreautara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046> diakses pada 28 Febuari 2024

akibat dari pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara dan lebih memihak kepada Amerika Serikat sehingga kebijakan ini pun juga dinilai gagal.<sup>24</sup>

Pada Desember 2011, Kim Jong-Il meninggal akibat serangan jantung dan Kim Jong- Un dinyatakan sebagai penggantinya. Sejak masa kepemimpinan Kim Jong-Un pada 2012, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan berada dalam situasi yang tidak stabil. Korea Utara, yang sejak awal berdirinya, tidak menyukai adanya tentara Amerika Serikat di Korea Selatan. Ketidaksukaan ini semakin meningkat dikarenakan latihan militer gabungan yang diadakan Amerika Serikat bersama Korea Selatan setiap tahunnya. Pertemuan antar keluarga yang terpisah kerap kali terhenti dilaksanakan dikarenakan Korea Utara menolak untuk mengadakan dialog dengan Korea Selatan. Penolakan ini terutama didasari karena adanya provokasi dari pihak Korea Selatan berupa slogan maupun propaganda anti Korea Utara. Pada tahun 2013, kedua negara sempat berada dalam keadaan perang setelah deklarasi yang dinyatakan oleh Korea Utara. Pernyataan ini disebabkan oleh respon Amerika Serikat yang memprovokasi Korea Utara dengan mendatangkan pesawat pembom ke semenanjung Korea sebagai respon terhadap percobaan nuklir yang dilaksanakan Korea Utara. Sebagai akibatnya, *Gaesong Industrial Complex* (GIC) ditutup sementara oleh pemerintah Korea Utara. Namun pembicaraan terkait normalisasi wilayah tersebut diadakan pada tahun yang sama.

Pada tahun 2014, pembicaraan terkait pertemuan keluarga yang terpisah kembali dilaksanakan walaupun provokasi militer antar kedua negara tetap terjadi. Tidak hanya itu, Korea Selatan kembali menyiarkan propaganda pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016, mengikuti eskalasi hubungan di semenanjung Korea yang terutama disebabkan oleh penempatan *terminal high altitude area defense* (THAAD) di Korea Selatan oleh Amerika Serikat, GIC akhirnya ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pembicaraan terkait pertemuan keluarga pun tidak lagi dilaksanakan.

---

<sup>24</sup> Ibid

Dengan ditutupnya GIC, Korea Utara dan Korea Selatan tidak lagi memiliki kerja sama ekonomi.

### **Kebijakan pada masa pemerintahan Moon Jae In**

Pada 2017 Moon Jae In terpilih sebagai presiden Korea Selatan. Tidak seperti dua pemimpin sebelumnya yakni Lee Myung-bak dan Park Geun-hye yang meninggalkan kebijakan *sunshine policy* justru, Moon Jae In mengatakan bahwa ia akan menggunakan pendekatan dengan Korea Utara melalui perbaikan hubungan kedua negara. Moon Jae In juga berencana memberlakukan kembali kerjasama antar Korea dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam cakupan sanksi internasional yang diberlakukan kepada Korea Utara. Pendekatan Moon Jae In terinspirasi dari kebijakan *ostpolitik* yang pernah diberlakukan untuk Jerman Timur dan Jerman Barat yakni dengan cara berhubungan secara langsung, atau juga dapat disebut sebagai Usaha usaha Moon Jae In dalam rangka menormalkan kembali hubungan kedua Korea.<sup>25</sup>

Hal ini dilakukannya karena Ia menyadari bahwa menciptakan perdamaian di semenanjung Korea tidak bisa hanya dilakukan oleh Korea Selatan saja, sehingga Moon memandang bahwa sudah saatnya Korea Selatan dan Korea Utara bersama-sama menciptakan perdamaian di kawasan. Tentunya hal ini tidak mudah mengingat Moon Jae In mewarisi situasi sulit akibat ketidakberhasilan pemimpin sebelumnya, yakni Park Geun Hye dalam menghadapi Korea Utara. Oleh karena itu, Moon Jae In memutuskan untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara dimana kebijakan tersebut membuka prospek perdamaian antar dua Korea. Faktor keberhasilan ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Moon Jae In yang cenderung menyelesaikan segala permasalahan dengan negosiasi dan

---

<sup>25</sup> Yoon Young Kwang, Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon, project syndicate (6 Juni 2017) Internet, <https://www.project-syndicate.org/commentary/moon-jae-in-foreign-policy-north-korea-by-yoon-young-kwan-2017-05/indonesian> diakses pada 5 Maret 2024

menjalin komunikasi dengan Korea Utara. Tercatat, Moon Jae In berhasil menemui Kim Jong Un secara langsung sebanyak 3 kali yang mana hal ini tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Park Geun Hye. Tidak hanya komunikasi secara langsung, Moon juga diketahui rutin saling berkirim surat dengan Kim Jong Un. Sikap Moon Jae In nyatanya berhasil membuat Korea Utara melunak, meskipun terkadang negara tersebut tetap melakukan aktivitas militernya. Namun, Moon Jae In lebih berupaya untuk menyelesaikan semuanya dengan cara negosiasi dan diplomasi. Respon baik yang diterima Moon Jae In dari Korea Utara ini menyebabkan ia konsisten menempuh kebijakan yang lebih terbuka dan humanis kepada Korea Utara, sehingga aksi-reaksi yang muncul antara dua Korea di masa pemerintahan Moon Jae In cenderung kooperatif.

Melalui pidato Berlin Initiative yang disampaikan di Berlin pada 6 juli 2017 di Körber Foundation, Presiden Moon Jae In berkesempatan untuk menyampaikan keinginannya untuk dapat mewujudkan unifikasi Korea. Dalam pidato tersebut Presiden Moon Jae In menyampaikan bahwa *Unifikasi* merupakan salah satu proses yang penting dalam mencapai dan mewujudkan perdamaian.<sup>26</sup>

Moon Jae In Sama seperti Kim Dae Jung dengan sunshine policy nya, presiden Moon Jae In memiliki kebijakan tersendiri dalam isu ini. Keinginan presiden Moon atas semenanjung Korea yang damai pertama kali disampaikan dalam pidatonya di Altes Stadhaus, Berlin. Pidato tersebut berisikan permintaan kepada Korea Utara untuk melanjutkan dialog dan kerjasama dengan Korea Selatan, dikenal sebagai *Berlin Initiative*.<sup>27</sup>

Pada bulan april 2018 tepatnya pada tanggal 27 merupakan hari ketika pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan pemimpin Korea Selatan, Moon Jae

---

<sup>26</sup> KBS World Indonesia, “ Deklarasi Berlin dan Kegiatan Diplomasi Presiden Moon Jae-in”, KBS World (17 Mei 2017),internet, [https://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=issues&id=&board\\_seq=58227&page=194&board\\_code=](https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=issues&id=&board_seq=58227&page=194&board_code=) diakses pada 5 Maret 2024

<sup>27</sup> Loc.Cit.,”Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula” ,unikorea,( 9 Juli 2017),[www.unikorea.go.kr/eng\\_unikorea/policyIssues/koreanpeninsula/goals/#self](http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyIssues/koreanpeninsula/goals/#self) diakses 8 Maret 2024

In menyepakati Deklarasi Panmunjom yang sebelumnya telah mereka susun yang didalamnya terdiri dari beberapa kesepakatan yang berhubungan dengan reunifikasi Korea.<sup>28</sup> Pertemuan antar kedua negara tersebut diselenggarakan di Gedung perdamaian, zona demiliterisasi, Panmunjom, Korea Selatan.<sup>29</sup> Deklarasi ini merupakan sejarah bagi kedua negara karena untuk pertama kalinya kedua negara menandatangani perjanjian perdamaian karena selama ini perjanjian yang digunakan untuk mengakhiri perang hanyalah perjanjian gencatan senjata. Beberapa poin utama yang tercantum dalam deklarasi tersebut antara<sup>30</sup>:

1. Denuklirisasi: Korea Selatan dan Korea Utara menyatakan komitmen bersama untuk mencapai denuklirisasi penuh, menjadikan Semenanjung Korea sebagai zona bebas nuklir.
2. Rezim Perdamaian: Kedua negara sepakat untuk mendorong pertemuan trilateral dengan Amerika Serikat, atau pertemuan empat pihak dengan Tiongkok, guna mengakhiri Perang Korea, menggantikan gencatan senjata dengan perjanjian perdamaian, dan membentuk rezim perdamaian yang permanen dan stabil
3. Kunjungan ke Pyongyang: Para pemimpin setuju untuk mengadakan pertemuan rutin dan berkomunikasi melalui telepon. Dalam konteks ini, Presiden Moon Jae-In sepakat untuk mengunjungi Pyongyang pada musim gugur.
4. Reuni Keluarga: Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk melanjutkan program reuni bagi keluarga yang terpisah akibat konflik.
5. Penggabungan Kekuatan Olahraga: Kedua pihak setuju untuk bersatu dalam acara olahraga internasional di bawah satu bendera, yaitu

---

<sup>28</sup> Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of The Korean Peninsula, Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, ( 9 September 2018), internet, [www.mofa.go.kr](http://www.mofa.go.kr) diakses 15 Maret 2024

<sup>29</sup> U.S Department of State, "U.S. Relations With North Korea", internet, [www.state.gov](http://www.state.gov) diakses 15 Maret 2024

<sup>30</sup> General Assembly Security Council, "Annex to the letter from representative of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to the United Nations addressed to Secretary-General: Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula", Mofa", ( 10 September 2018), Internet, [www.Mofa.go.kr](http://www.Mofa.go.kr) diakses 10 April 2024



bendera unifikasi Korea, yaitu dalam asian games 2018 dan olimpiade musim dingin 2018.

6. Perlucutan Senjata: Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk memulai proses perlucutan senjata secara bertahap, yang akan dilakukan seiring dengan menurunnya ketegangan militer dan tercapainya kemajuan signifikan dalam membangun kepercayaan di bidang militer.
7. Tidak Ada Lagi Perang: Para pemimpin kedua Korea dengan tegas menyatakan kepada 80 juta penduduk Korea dan seluruh dunia bahwa perang di Semenanjung Korea tidak akan terjadi lagi, menandakan dimulainya era baru perdamaian.

### **Keentingan Nasional Korea Selatan dalam Deklarasi Panmunjom**

Keentingan nasional merupakan dasar utama bagi suatu negara dalam bertindak dan dianggap sebagai tujuan utama negara. Untuk memenuhi dan mencapai tujuan ini, diperlukan kekuatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan dan mencapai tujuan utama dari kepentingan nasional tersebut.<sup>31</sup>

Setelah Korea Utara menandatangani sanksi ekonomi yang di jatuhkan oleh PBB akibat uji coba nuklir, Korea Selatan memanfaatkan situasi tersebut guna membangun dialog dengan Korea Utara untuk menginisiasi Deklarasi Panmunjom. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Waltz Dimana Neorealisme berfokus pada perubahan sistem dan unit-unit yang saling berinteraksi.<sup>32</sup> Dimana pada penelitian ini dalam membangun dialog dengan Korea Utara peneliti melihat bahwa Korea Selatan memanfaatkan kondisi di jatuhkan nya sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, sanksi tersebut berupa berupa embargo yang melarang Korut untuk mengekspor komoditas hasil tambangnya. Barang-barang Korea Utara yang bakal

---

<sup>31</sup> Anantha, I. G., & Monica, E. M, Studi diplomasi dan keamanan.

<sup>32</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company, 1979) 126

disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah ada pula ikan dan hasil laut.<sup>33</sup>

Sehingga dengan adanya sanksi ini membuat Korea utara mau tidak mau harus menerima tawaran Korea Selatan untuk menyepakati deklarasi Panmunjom yang di inisiasi Oleh Korea Selatan guna tetap menjaga kondisi ekonominya. Dalam menginisiasi deklarasi Panmunjom tentunya kepentingan nasional menjadi sebuah Faktor Utama, karena Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda, sehingga tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Menurut Donald E. Nuechterlein. Mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>34</sup> Donald E Nuechterlein membaginya menjadi 4 bagian yaitu:

Kepentingan pertahanan merupakan kepentingan dari suatu negara untuk melindungi negaranya dari segala ancaman yang bisa datang dari pihak luar maupun dalam yang tentu saja mengancam kedaulatannya. Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara selama 65 tahun telah menyebabkan munculnya permasalahan keamanan yaitu dilema Keamanan atau *security Dilemma* yang juga merupakan dampak dari kepemilikan nuklir Korea Utara. Kepemilikan nuklir sendiri secara umum sudah mampu menyebabkan munculnya isu *security dilemma* bagi Korea Selatan.<sup>35</sup>

Uji coba yang terus menerus dilakukan oleh Korea Utara menyebabkan *security dilemma* di kawasan Asia Timur dan di dunia internasional. Meskipun Korea Utara mengklaim bahwa pengembangan nuklir mereka semata-mata untuk penelitian dan peningkatan sistem keamanan negara,

---

<sup>33</sup> BBC, "DK PBB jatuhkan sanksi 'paling keras sepanjang satu generasi' terhadap Korea Utara", BBC.com (6 agustus 2017) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40841491> diakses 20 Maret

<sup>34</sup> Donald E. Nuechterlein, National Interest A new Approach, Orbis, Vol. 23, No. 1 (Spring), 1979

<sup>35</sup> Alaydrus, MZ, "Ancaman Nuklir dan Masa Depan Keamanan Global", Kompasiana (12 Oktober 2021), Internet, <https://www.kompasiana.com/mzeinalaydrus1064/61655d5306310e135d373ff5/ancaman-nuklir-dan-masa-depan-keamanan-global> diakses 25 Maret 2024

tindakan tersebut justru memicu ketegangan di Asia Timur hingga ke tingkat internasional.

Tahun	Uji Coba Nuklir
2012	2
2013	6
2014	19
2015	15
2016	24
2017	21

**Tabel 4.1 Data Uji Coba Nuklir Korea Utara 2012-2017**

Sumber: <https://mediaindonesia.com/infografis/528017/uji-coba-nuklir-korea-utara-capai-rekor-terbanyak>

Jika kita mengacu Terhadap data diatas maka sebelum terjadinya deklarasi Panmunjom, Uji Coba nuklir yang dilakukan Korea Utara Begitu masif bahkan jika di total dari 2012 sampai 2017 tercatat sudah dilakukan 87 percobaan hal ini tentu saja menjadi sebuah ancaman yang nyata terhadap Korea Selatan. Keadaan ini tentu saja menjadi alasan dibalik inisiasi deklarasi Panmunjom oleh Korea Selatan dan Dalam Deklarasi Panmunjom terdapat beberapa poin yang menyepakati kedua belah pihak untuk mengurangi persenjataan, menetralkan beberapa kawasan yang digunakan untuk uji coba militer dan yang paling penting ialah denukliriasi.

Pelucutan senjata mencakup semua upaya untuk meningkatkan keamanan dengan menstabilkan perlombaan senjata di antara negara-negara yang mungkin berseteru. Ini dilakukan dengan mengatur operasi dan struktur kekuatan militer (termasuk pasukan dan persenjataan) serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran perjanjian, sehingga mengurangi atau menghilangkan risiko dan beban perang. Dalam Deklarasi Panmunjom, Korea Utara dan Korea Selatan menyepakati untuk mencapai pelucutan senjata secara bertahap seiring dengan berkurangnya ketegangan militer dan terbentuknya rasa saling percaya di bidang militer. Hal Ini dapat dianggap sebagai penegasan kembali komitmen kedua pemimpin untuk membangun kepercayaan militer yang telah disepakati dalam Perjanjian Dasar Antar-

Korea sebelumnya, yang telah ditegaskan kembali melalui Deklarasi Panmunjom.<sup>36</sup>

Dalam mengimplementasi Deklarasi Panmunjom, otoritas militer Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk sepenuhnya menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap satu sama lain di darat, laut, dan udara mulai 1 November 2018. Selama proses ini, Korea Selatan, Korea Utara, dan Komando PBB mengadakan tiga pertemuan. Langkah-langkah demiliterisasi di Kawasan Keamanan Bersama (JSA) di Panmunjom juga dilakukan secara teratur, termasuk pertemuan badan konsultasi tiga pihak. Secara khusus, otoritas militer dari kedua Korea menarik senjata, peralatan, dan personel dari 11 pos penjagaan yang disepakati untuk dibongkar sebagai simbol niat baik. Pada 30 November 2018, pembongkaran dan penghancuran selesai di 10 pos penjagaan, dengan satu pos dipertahankan untuk keperluan preservasi.<sup>37</sup> Selain itu, pada 12 Desember 2018, tentara dari kedua negara melintasi Garis Demarkasi Militer untuk pertama kalinya sejak pemisahan, dan melakukan inspeksi bersama terhadap 11 pos penjagaan yang ditargetkan untuk penarikan. Di Bukit Arrowhead, zona demiliterisasi di daerah Cheorwon, operasi pemindahan ranjau dan pembangunan jalan selesai sebagai persiapan untuk penggalian sisa-sisa bersama yang dijadwalkan dimulai pada April 2019.<sup>38</sup>

Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Korea Selatan karena hilangnya ancaman yang selama ini menjadi *security dilemma* bagi Korea Selatan. Pada hari yang bersamaan kedua otoritas Korea menghentikan semua latihan artileri senjata api langsung dan manuver antar rezim, Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan berencana mendukung kebijakan pemerintah terhadap Korea Utara dalam upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran di semenanjung Korea. Dukungan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan perjanjian militer tanpa hambatan,

---

<sup>36</sup> Kim, Kang-nyeong, "Recent Progress and Tasks of Arms Control in South and North Korea", [Korea Institute of Politics and Society](#) Volume 3 Issue 2, 2019

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

pengurangan ketegangan militer, serta peningkatan kepercayaan antara Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>39</sup>

Dalam perjanjian terkait menetralkan beberapa Kawasan, otoritas militer Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk terus membahas berbagai langkah implementasi guna melaksanakan Deklarasi Panmunjom, yang menyepakati perlucutan senjata secara bertahap, hal ini menandai pertama kalinya Korea Selatan dan Korea Utara berhasil mencegah konflik melalui kontrol militer. Upaya untuk meredakan ketegangan militer melibatkan kunjungan timbal balik yang dihadiri oleh menteri pertahanan untuk membahas isu-isu militer yang mungkin akan dihadapi bersama di masa depan. Selain itu, Zona Demiliterisasi diubah menjadi Zona Perdamaian, dan wilayah Laut Barat dijadikan Zona Perdamaian Maritim yang berfungsi untuk menjaga kedamaian serta mencegah penjarahan sumber daya laut secara ilegal.<sup>40</sup>

Yang menjadi *highlight* dari deklarasi Pamunjom ialah kedua negara sepakat untuk melakukan denuklirisasi, denuklirisasi Merujuk pada tindakan untuk menghilangkan senjata nuklir dari suatu negara atau wilayah, sehingga tidak ada lagi kemampuan untuk memproduksi atau menggunakan senjata tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dunia yang bebas dari ancaman nuklir dan meningkatkan keamanan global.<sup>41</sup> Denuklirisasi menjadi isu penting terutama setelah Korea Utara mengembangkan program nuklirnya. Upaya untuk mencapai denuklirisasi sering kali mengalami kegagalan di karenakan sering kali melanggar perjanjian tersebut seperti pada seperti yang terjadi di 2000 dan 2007, maka dari itu perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang mengingkari perjanjian tersebut. Denuklirisasi akan menghilangkan kekhawatiran Korea Selatan terhadap ancaman nuklir di Semenanjung Korea. Perdamaian juga mengurangi

---

<sup>39</sup> Indira Kartini, "Deklarasi, Pamunjom dan Prospek perdamaian di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un, Jurnal penelitian Politik", Vol. 15, No. 1, (Juni 2018), Jakarta: LIPI

<sup>40</sup> Kim, Kang-nyeong, "Recent Progress and Tasks of Arms Control in South and North Korea", [Korea Institute of Politics and Society](#) Volume 3 Issue 2, 2019

<sup>41</sup> Elisabeth Pelupessy, Tabitha Eunice, I Gede Pasek Eka, "Tindakan denuklirisasi KOREA UTARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL", Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum volume 8 no 1, hal. 1-15, 2019

kekhawatiran Korea Selatan terhadap kemungkinan terjadinya perang terbuka. Meskipun Korea Utara suatu saat mungkin diam-diam mengembangkan senjata nuklir lagi, jika melihat pada kesepakatan sebelumnya namun kemungkinan mereka akan menjadi ancaman besar bagi Korea Selatan tetap kecil.

Namun hambatan dari perlucutan senjata dan denuklirisasi ialah masih adanya rasa ketidakpercayaan dan permusuhan yang masih ada antara Korea Utara dan Selatan. Terbaginya semenanjung Korea menjadi 2 wilayah pada 1945 dan perang Korea pada 1950, hal ini membuat hubungan antara kedua negara tersebut semakin memperburuk ketidakpercayaan dan ketegangan, yang pada akhirnya memicu perlombaan kekuatan militer.

Nuklir merupakan ancaman yang paling nyata yang membayang-bayangi Korea Selatan. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan Korea Selatan yang merasa terancam oleh tindakan militer yang di lakukan oleh Korea Utara. Maka dari itu kesepakatan diatas sangat menguntungkan bagi Korea Selatan, dimana Korea Selatan dapat menghilangkan ancaman dari Korea utara namun perlu diingat Korea Utara kerap kali membatalkan atau mengingkari perjanjian sebelumnya, maka di dari itu pemberian sanksi perlu dilakukan.

Kepentingan Ekonomi Merupakan kepentingan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta menjaganya tetap stabil. Meskipun dalam deklarasi Panmunjom yang menjadi sorotan adalah denuklirisasi dan perjanjian perdamaian, namun deklarasi Pamunjom juga berdampak positif terhadap pasar saham Korea Selatan, yang sebelumnya mengalami penurunan akibat uji coba senjata nuklir Korea Utara. Secara ekonomi, indeks KOSPI ditutup menguat sebesar 33,84 poin atau 1,59% menjadi 2.195,08, setelah sebelumnya naik 0,21% pada sesi perdagangan sebelumnya.<sup>42</sup> Selain itu, indeks KOSPI 200 berjangka juga naik 4,76 poin atau 1,69% ke posisi 286,70, setelah sebelumnya mengalami penurunan hingga 283,30 setelah uji coba senjata nuklir Korea Utara pada tahun 2016,

---

<sup>42</sup> Allens.J, "Bursa Saham Korsel 24 Juni Menguat Setelah Korut Tunda Aksi Militernya", (20 juni 2020), Vibiznews.Com, <https://www.vibiznews.com/2020/06/24/bursa-saham-korsel-24-juni-menguat-setelah-korut-tunda-aksi-militernya/> diakses pada 8 April 2020

dan kemudian mencapai puncak tertingginya di 288,30 pada tahun 2018. Penguatan KOSPI selama sesi tersebut didukung oleh lonjakan saham teknologi besar, seperti Samsung Electronics yang naik 2,92 persen dan pembuat chip SK hynix yang menambah 2,26 persen.<sup>43</sup> Hal ini membuktikan bahwa deklarasi Panmunjom secara tidak langsung berdampak pada ekonomi Korea Selatan.

Selain itu industri yang dimiliki oleh Korea Selatan termasuk didalamnya investasi dan sektor pariwisata sangat berpengaruh dalam membangun dan mempertahankan perekonomian negeri ginseng ini. Uji coba dan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mengganggu iklim investasi yang ada di kawasan Asia Timur.

Dalam aspek Ekonomi kedua negara sepakat untuk mewujudkannya ialah dengan menghubungkan kembali serta me-modernisasi jalur kereta api dan jalan di pantai timur untuk menghubungkan langsung di antara keduanya. Peletakan batu pertama proyek kereta api tersebut pada 26 Desember 2018 lalu,<sup>44</sup> meskipun progress pembangunan ini cukup signifikan diantara keduanya. Pihak dari Korea Selatan meyakini bahwa proyek ini tidak akan bisa bergerak maju tanpa pencabutan sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) terhadap Korea Utara.<sup>45</sup>

Proyek ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Korea Selatan dan dapat menciptakan zona ekonomi baru yang mana akan menguntungkan kedua negara mengingat akan memudahkan kegiatan ekspor impor anantara kedua negara. Namun sejatinya bantuan ekonomi dan proyek Bersama ini merupakan suatu perantara untuk mencapai kepentingan utamanya yaitu

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> VOA, " Sanksi AS Blokir Pembangunan Jalur Kereta Korea", VOA (26 Desember 2018), <https://www.voaindonesia.com/a/korea-bangun-jalur-kereta-tapi-sanksi-blokir-proyek-itu/4716501.html> diakses 9 April 2018

<sup>45</sup> Agni Vidya Perdana, "PBB Beri Kelonggaran Sanksi Korea Utara untuk Proyek Kereta Api", Kompas (25 November 2018), <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/25/05000001/pbb-beri-kelonggaran-sanksi-korea-utara-untuk-proyek-kereta-api>. Diakses 10 April 2024

menjaga keberlangsungan jalur ekonomi Korea Selatan yang sedikit terdampak akibat uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.

Kepentingan Tata Internasional Sejatinya merupakan upaya pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman. Dalam hal ini untuk menjaga Korea Selatan berupaya untuk untuk menjaga stabilitas di kawasan semenanjung Korea buktikan dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan China, Korea Selatan dapat membaca situasi sistem internasional yang sedang terjadi. Sistem internasional yang bipolar menjadikan dunia internasional tidak terlepas oleh hegemoni dan kepentingan dari Amerika Serikat dan Cina. Tentunya Hal ini bertujuan untuk melindungi *self interest* nya di Kawasan semenanjung Korea.

Hal ini terbukti didalam deklarasi Panmunjom untuk mengadakan pertemuan antara China dan Amerika Serikat, yang bertepatan dengan peringatan 65 tahun gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan, tertulis bahwa kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan melibatkan kedua Korea dan Amerika Serikat atau pertemuan quadrilateral yang melibatkan kedua Korea, Amerika Serikat dan Cina. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan penghentian perang dan mengubah status gencatan senjata menjadi sebuah rezim damai yang permanen dan solid.<sup>46</sup>

Hal ini dibuktikan dengan Korea Selatan sukses menjembatani pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang sukses diadakan di Hotel Capella Singapura.<sup>47</sup> Langkah penting pertama terjadi pada Maret 2018, ketika pejabat Korea Selatan bertindak sebagai perantara, menyampaikan undangan pribadi dari Kim

---

<sup>46</sup> General Assembly Security Council, "Annex to the letter from representative of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to the United Nations addressed to Secretary-General: Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula", Mofa", ( 10 September 2018),Internet,www.Mofa.go.kr diakses 10 April 2024

<sup>47</sup> CCN,"In pictures: President Trump meets Kim Jong Un",CCN.com, internet,( 12 Juni 2018), internet, <https://www.cnn.com/interactive/2018/06/politics/trump-kim-summit-cnnphotos/> diakses pada Pada 10 April 2024



Jong Un kepada Donald Trump. Undangan ini berujung pada KTT Singapura 2018, tempat kedua pemimpin bertemu untuk pertama kalinya. KTT yang diadakan pada 12 Juni 2018 itu menandai terobosan diplomatik besar saat para pemimpin membahas denuklirisasi dan masa depan hubungan AS-Korea Utara.<sup>48</sup>

Keterlibatan Korea Selatan tidak berhenti di situ. Negara itu terus menjadi penengah antara AS dan Korea Utara, bahkan saat ketegangan meningkat dan negosiasi tampaknya goyah di berbagai titik. Pemerintahan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bekerja tanpa lelah untuk menjaga dialog tetap terbuka, menunjukkan komitmen Korea Selatan terhadap perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.<sup>49</sup> Tentunya hal ini semata-mata demi memenuhi *self interest* yang dimana denuklirisasi tidak akan tercapai bila mana hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara masih buruk, karena Amerika sendiri yang merupakan sekutu bagi Korea Selatan memiliki pasukan yang di tempatkan di kawasan Asia Timur khususnya Korea Selatan serta memiliki kepentingannya tersendiri untuk ikut campur dalam permasalahan di semenanjung Korea.

Korea Selatan juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan baik dengan China yang merupakan sekutu Korea Utara, dalam beberapa dekade memiliki berbagai kerjasama ekonomi dengan Cina, bahkan Korea Selatan menjadikan Cina sebagai second domestic market, alasannya ialah nilai ekspor-impor serta minat produk Korea Selatan masih tinggi di Cina.<sup>50</sup> Bahkan pada tahun 2017 ekspor Korea Selatan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2017, didorong oleh permintaan yang kuat terhadap produk ekspor utamanya. Ekspor, yang merupakan sekitar setengah dari perekonomian yang bergantung pada perdagangan, mencapai puncak tahunan baru sebesar 573,9 miliar dolar AS pada tahun 2017, meningkat 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya,

---

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Scott A. Snyder, "Kim Jong-un's Invitation and Donald Trump's Response", Council on Foreign Relations.org, (16 Maret 2018), <https://www.cfr.org/blog/kim-jong-uns-invitation-and-donald-trumps-response> diakses pada 10 April 2024

<sup>50</sup> Scott Snyder, "Regime Change and another Nuclear Crisis: Comparative Connection", An E- Journal on East Asian Bilateral Relation 4. No 4 (2003)

seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi Korea Selatan bila mana kehilangan China sebagai second marketnya.<sup>51</sup> Dengan terlibatnya Amerika Serikat dan China tentunya akan dapat terciptanya *balance of power* di kawasan asia timur.

Jika melihat data diatas tentunya Korea Selatan berupaya menjaga stabilitas kawasan semenanjung Korea agar dapat terciptanya *balance of power* di kawasan semenanjung Korea, untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kepentingan Ideologi (*ideological Interest*) perlindungan terhadap ideologi atau nilai- nilai yang dipenggang oleh masyarakat. Dalam hal ini perbedaan Ideologi menjadi sebuah hambatan bagi kedua negara dimana baik Korea Selatan maupun Korea Utara memiliki ideologi yang kuat yang tertanam pada sejarah dan identitas nasional mereka. Korea Selatan, dengan ideologi demokratis dan kapitalis, berusaha untuk menunjukkan bahwa pendekatan dialog dan kerjasama dapat mengarah pada stabilitas dan kemakmuran. Di sisi lain, Korea Utara, yang menganut ideologi Juche, ingin mempertahankan pelestarian dan keamanan nasionalnya sambil mencari pengakuan internasional sebagai negara yang setara.<sup>52</sup> Perbedaan ideologi sendiri kerap kali menjadi tembok penghalang yang kerap kali menghalangi kedua negara tersebut untuk berdamai.

Korea Selatan sendiri ingin menjadikan Korea Utara sebagai mitra dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran di semenanjung Korea, sehingga pendekatan yang pertama diambil melalui cara yang halus dengan mengajak mengirimkan team gabungan dengan berada dalam satu bendera yaitu bendera Unifikasi dalam asian games 2018 dan asian para games 2018, hingga akhirnya kedua Negara menyepakati untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, serta memberikan momentum lebih lanjut pada

---

<sup>51</sup> Jiabin, " S.Korea's export hit record yearly high in 2017 at 573.9 bln USD", Xinhuanet,( 1 Januari 2018),Internet, [http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c\\_136864514.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136864514.htm) diakses 11 April 2024

<sup>52</sup> Brigitha Leovani Pailo, Agussalim Burhanuddin, " EVALUASI EFEKTIVITAS DEKLARASI PANMUNJOM DALAM PROSES DENUKLIRISASI SEMENANJUNG KOREA", PARADIGM: Volume 2 No 01 , 2024

atmosfer rekonsiliasi dan persatuan nasional. Dihadapan internasional, keduanya sepakat untuk menunjukkan kearifan, bakat dan persatuan bangsa dengan ikut berlaga pada satu bendera seperti kegiatan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.<sup>53</sup>

Dengan ini maka Korea mengirimkan tiga tim, yakni tim Korea Selatan, Korea Utara dan Tim Korea Bersatu. Cabang olahraga yang diikuti tim Korea Bersatu yakni bola basket putri, Perahu Naga dan juga cabang olahraga dayung.<sup>54</sup> Sebelumnya kedua korea juga telah mengirimkan delegasinya pada Olimpiade Musim Dingin pada 2018 lalu, meskipun cabang olahraga yang diikuti hanya hoki es nomor putri. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membangun identitas Bersama.

Dalam hal ini Korea Selatan ingin menunjukan bahwa ideologi liberalisme yang dianutnya, jauh lebih baik dibandingkan dengan Ideologi Juche Korea utara yang cenderung lebih tertutup. Hal ini terlihat dari metode-metode yang dilakukan oleh Korea Selatan seperti halnya diplomasi melalui olahraga yang mampu menjembatani perbedaan ideologi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Analisis data Dalam menginisiasi Deklarasi Pamunjom Korea Selatan memanfaatkan perubahan yang terjadi yaitu Di jatuhnya sanksi Ekonomi terhadap Korea Utara Oleh PBB, Korea Utara mau tidak mau harus menerima inisiasi tersebut. Di balik narasi perdamaian yang di gaungkan oleh Korea Selatan tentunya ada Kepentingan Nasional yang ingin dicapai. Terlebih lagi 1 tahun sebelum Deklarasi Panmunjom di tanda tangan yang menjadi sebuah security dilemma bagi Korea Selatan Dalam Kepentingan pertahanan sangat terlihat jelas dalam terdapat banyak poin yang sangat menguntungkan bagi Korea Selatan yaitu mengenai pelucutan senjata, mentralkan beberapa Kawasan serta yang paling penting ialah denuklirisasi yang tentu saja akan sangat menguntungkan Korea Selatan karena terbebas dari salah satu ancaman, akan tetapi meskipun kedua negara telah

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> VOA, "Tim Gabungan Korea Menang Medali Bersejarah di Asian Games", VOA, (26 Agustus 2018), internet, www.voaindonesia.com diakses 12 April 2024

sepakat namun pada kenyataannya belum ada tindak lanjutnya lagi dari kedua negara.

Dari segi Ekonomi Korea Selatan Ingin menjaga kawasannya guna kepentingan Ekonominya, karena kawasan Semenanjung Korea yang damai serta bebas dari ancaman nuklir akan memberikan berbagai keuntungan bagi Korea selatan diantaranya ialah meningkatkan nilai investor global, memberikan rasa aman kepada parawisatawan serta meningkatkan permintaan global akan produk-produk Korea Selatan. Meningkatnya sektor perekonomian Korea Selatan sebagai imbas dari hubungan baik Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu proyek jalur Kereta yang menghubungkan antara dua Korea dan China akan sangat menguntungkan karena adanya jalur logistik baru. Dalam kepentingan Tata Internasional Korea Selatan ingin mewujudkan stabilitas di kawasan semenanjung Korea demi melindungi self interestnya, hal ini di tunjukan dengan menjadi mediator antara Korea Utara dan Amerika Serikat karena untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea, perlu adanya perdamaian antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Selain itu Korea Selatan memiliki kepentingan mempertahankan second market yaitu China yang merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Kepentingan Ideologi Korea Selatan ingin membentuk identitas bersama dan menunjukkan ideologinya jauh lebih baik.

## **REFERENSI**

- Agni Vidya Perdana, "PBB Beri Kelonggaran Sanksi Korea Utara untuk Proyek Kereta Api", Kompas (25 November 2018), <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/25/05000001/pbb-beri-kelonggaran-sanksi-korea-utara-untuk-proyek-kereta-api>
- Allens.J,"Bursa Saham Korsel 24 Juni Menguat Setelah Korut Tunda Aksi Militernya", (20 juni 2020), Vibiznews.Com, <https://www.vibiznews.com/2020/06/24/bursa-saham-korsel-24-juni-menguat-setelah-korut-tunda-aksi-militernya/>
- Anantha, I. G., & Monica, E. M, Studi diplomasi dan keamanan.

BBC,” DK PBB jatuhkan sanksi 'paling keras sepanjang satu generasi' terhadap Korea Utara”, BBC.com ( 6 agustus 2017), [https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40841491\](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40841491)

Brigitha Leovani Pailo, Agussalim Burhanuddin,” EVALUASI EFEKTIVITAS DEKLARASI PANMUNJOM DALAM PROSES DENUKLIRISASI SEMENANJUNG KOREA”, PARADIGM: Volume 2 No 01 , 2024

CCN,”In pictures: President Trump meets Kim Jong Un”,CCN.com, internet,( 12 Juni 2018), internet, <https://www.cnn.com/interactive/2018/06/politics/trump-kim-summit-cnnphotos/>

Donald E. Nucterlain, National Interest A new Approach, Orbis, Vol. 23, No. 1 (Spring), 1979,

Elisabeth Pelupessy , Tabitha Eunice, I Gede Pasek Eka,” Tindakan denuklirisasi KOREA UTARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”, Kertha Negara : Journal

General Assembly Security Council, “Annex to the letter from representative of the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea too the United Nations addressed to Secretary-General: Panmunjom Declaration on Peace, Proseperity and Reunification of the Korean Penisula”, Mofa”, ( 10 September 2018),Internet,www.Mofa.go.kr

General Assembly Security Council, “Annex to the letter from representative of the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea too the United Nations addressed to Secretary-General: Panmunjom Declaration on Peace, Proseperity and Reunification of the Korean Penisula”, Mofa”, ( 10 September 2018),Internet,www.Mofa.go.kr diakses 10 April 2024

Ilmu Hukum volume 8 no 1, hal. 1-15, 2019.

Indira Kartini,”Deklarasi,Pamunjom dan Prospek perdamaian di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un,Jurnal penelitian Politik”, Vol. 15, No. 1, (Juni 2018),Jakarta: LIPI

Jiabin,” S.Korea's export hit record yearly high in 2017 at 573.9 bln USD”,  
Xinhuanet,( 1 Januari 2018),Internet,  
[http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c\\_136864514.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/01/c_136864514.htm)

KBS World Indonesia, “ Deklarasi Berlin dan Kegiatan Diplomasi Presiden  
Moon Jae-in”, KBS World( 17 Mei 2017), internet,  
[https://world.kbs.co.kr/service/contents\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=issues&id=&board\\_seq=58227&page=194&board\\_code=](https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=issues&id=&board_seq=58227&page=194&board_code=) diakses pada  
5 Maret 2024

Kenneth Waltz, Theory of International Politics, (Berkeley: Addison-Wesley  
Publishing Company, 1979) 126

Kim, Hong Neck. “South-North Korean Relations Under The Roh Moo Hyun  
Government. *International Journal of Korean Studies*”, Vol. X, No.1,  
2006

Kim, Kang-nyeong,” Recent Progress and Tasks of Arms Control in South and  
North Korea”, *Korea Institute of Politics and Society* Volume 3 Issue 2,  
2019

Loc.Cit.,”Moon Jae-In’s Policy on the Korean Peninsula” ,unikorea,(9  
Juli 2017)  
,[www.unikorea.go.kr/eng\\_unikorea/policyIssues/koreanpeninsula/goals/#self](http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyIssues/koreanpeninsula/goals/#self) diakses 8 Maret 2024

Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of The Korean  
Peninsula, *Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea*,( 9 September  
2018),internet, [www.mofa .go.kr](http://www.mofa.go.kr) diakses 15 Maret 2024

Radio Australia, “Sejarah di balik ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan:  
kilas balik,” Radio Australia, , Internet ( 5 Maret  
2013) <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-koreautara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046>